



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 500/Kep.93-EK/II/2023
TENTANG
PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2022-2024

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05 - 8135 Tahun 2017, dalam pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian inflasi Daerah perlu disusun Peta Jalan Pengendalian inflasi Daerah;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a, Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022-2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	?
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12 Seri A);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional; ✓
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah; ✓
 3. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah; ✓
 4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 500/Kep.104.A-EK/III/2021 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022-2024.
- KEDUA** : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah ini merupakan panduan bagi setiap Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi dalam Pengendalian Inflasi periode 2022-2024.
- KEEMPAT** : Pencapaian target Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar dilaporkan oleh setiap Perangkat Daerah/Instansi terkait Tingkat Daerah Kota Bekasi setiap Triwulan kepada Wali Kota melalui Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	3
KEPALA BAGIAN HUKUM	4

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Februari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bekasi;
2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 500/Kep.93-EK/II/2023

TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022-2024

SUSUNAN TIM PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022-2024

I.	Pengarah	: 1. Wali Kota Bekasi; 2. Kepala Devisi Pengembangan Ekonomi/Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
II.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III.	Wakil Ketua	: Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi
IV.	Sekretaris	: Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi
V.	Anggota	: 1. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kota Bekasi; 2. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Bekasi; 3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bercana Daerah Kota Bekasi; 4. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kota Bekasi; 5. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Bekasi; 6. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Bekasi; 7. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi ; 8. Kepala Bidang Perencanaan Ruang pada Dinas Tata Ruang Dearah Kota Bekasi; 9. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kota Bekasi; 10. Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 11. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi; 12. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Bekasi; 13. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 14. Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

		<p>15. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bekasi;</p> <p>16. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;</p> <p>17. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi;</p> <p>18. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi;</p> <p>19. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bekasi;</p> <p>20. Satgas Pangan pada Polres Metro Bekasi Kota.</p>
--	--	---

Plt. WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 500/Kep.93-EK/II/2023

TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022-2024
PROGRAM KERJA PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022-2024

NO	STRATEGI	PROGRAM	SUB PROGRAM 2022-2024	TIMELINE			INSTANSI
				2022	2023	2024	
1	Keterjangkauan Harga	1. Stabilisasi Harga	a.	Peningkatan stabilitas harga dan stok barang kebutuhan pokok, melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah dan satgas pangan	a.	Harga barang kebutuhan pokok terkendali	Dinas Koperasi UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Bagian Perekonomian, Perum Bulog Subdivre
			b.	Monitoring dan pemantauan harga kebutuhan pokok	b.	Di pasar pantauan	
			c.	Sosialisasi keamanan pangan	c.	Melakukan pemeriksaan keamanan melalui food security	
				Optimalisasi kegiatan KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) beras		Melakukan penambahan pasokan beras secara berkala ke pasar untuk menahan kenaikan harga	Perum Bulog Subdivre Karawang, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

		Bazar murah dan operasi pasar kebutuhan pokok	a. Bazar murah b. Operasi pasar	a. Bazar murah b. Operasi pasar	a. Bazar murah b. Operasi pasar	Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2. Mengelola Permintaan	Monitoring dan pendataan distribusi/ stock gas elpiji 3 kg di tingkat agen dan pangkalan	a. Dengan sasaran kepada agen gas elpiji b. Dengan sasaran kepada agen gas elpiji	a. Dengan sasaran kepada agen gas elpiji b. Dengan sasaran kepada agen gas elpiji	a. Dengan sasaran kepada agen gas elpiji b. Dengan sasaran kepada agen gas elpiji	Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Monitoring dan pembinaan pelaku usaha distribusi bapokting	Dilaksanakan 2 kali dalam setahun	Dilaksanakan 2 kali dalam setahun	Dilaksanakan 2 kali dalam setahun	
		Substitusi konsumsi pangan pokok	Inventarisasi data potensi diverifikasi konsumsi pangan yang bergizi, beragam, berimbang, aman (pengumpulan data)	Pemetaan potensi diverifikasi konsumsi pangan yang bergizi, beragam, berimbang, aman (Pengumpulan data)	Pemetaan potensi diverifikasi konsumsi pangan yang bergizi, beragam, berimbang, aman (Pengumpulan data)	

PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

2

2. Ketersediaan Pasokan	1. Memperkuat produksi dan cadangan pangan pemerintah	Bogor berkebuun /integrated farming	a. Penambahan sarana dan prasarana	a. Penambahan sarana dan prasarana	a. Penambahan sarana dan prasarana	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, KPW Bank Indonesia Jabar, Bagian Perekonomian
			b. Penambahan dan optimalisasi Bekasi menanam	b. Penambahan dan optimalisasi Bekasi menanam	b. Penambahan dan optimalisasi Bekasi menanam	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			c. Pengembangan komoditas andil inflasi	c. Pengembangan komoditas andil inflasi	c. Pengembangan komoditas andil inflasi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Peningkatan Produksi Perikanan	Peningkatan produksi perikanan budidaya serta tebar benih	Peningkatan produksi perikanan budidaya serta tebar benih	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/ atau keadaan darurat	Cadangan pangan pemerintah daerah berupa beras sebanyak...ton	Cadangan pangan pemerintah daerah berupa beras sebanyak...ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2. Memperkuat Kelembagaan	Mendorong Peningkatan UMKM naik kelas melalui skema memitraan	Peningkatan Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Peningkatan Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Peningkatan Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Dinas Koperasi UMKM

3.	Kelancaran Distribusi	1.	Mendorong Kerjasama Perdagangan Antar Daerah	Perluasan Kerjasama Antar Daerah	Menjalين Kerjasama Antar Daerah Untuk Komoditas pangan Strategis (1 KAD)	Menjalين Kerjasama Antar Daerah Untuk Komoditas pangan Strategis (1 KAD)	Menjalين Kerjasama Antar Daerah Untuk Komoditas pangan Strategis (1 KAD)	Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Bagian Perekonomian, Bagian Hukum
		2.	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	Penguatan Digitalisasi UMKM	Penguatan Digitalisasi UMKM	Penguatan Digitalisasi UMKM	Penguatan Digitalisasi UMKM	Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
		3.	Revitalisasi	Pengaturan Waktu Bongkar Muat Barang	Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima	a. Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima b. Penertiban Pedagang Kaki Lima	a. Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima b. Penertiban Pedagang Kaki Lima	Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja
			Revitalisasi Pasar Tradisional dan Optimalisasi Pasar Mitra Tani	Revitalisasi Pasar Tradisional dan Optimalisasi Pasar Mitra Tani	a. Rehabilitasi Pasar Tradisional b. Optimalisasi Pasar Mitra Tani	a. Rehabilitasi Pasar Tradisional b. Optimalisasi Pasar Mitra Tani	Bappelitbangda, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi UMKM	

<p>4. Komunikasi Efektif</p>	<p>1. Memperbaiki Kualitas Data</p>	<p>Penguatan Data Harga dan Neraca Pangan</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</p>
		<p>Penyediaan Sistem Informasi panel Harga dan Monitoring Stock Pangan Strategis</p>	<p>a. Pengoptimalan Aplikasi Indag</p>	<p>a. Pengoptimalan Aplikasi Indag</p>	<p>a. Pengoptimalan Aplikasi Indag</p>	<p>a. Pengoptimalan Aplikasi Indag</p>	<p>a. Pengoptimalan Aplikasi Indag</p>	<p>a. Pengoptimalan Aplikasi Indag</p>	<p>a. Pengoptimalan Aplikasi Indag</p>	<p>Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</p>
		<p>Peran Aktif Kepala Daerah dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi pangan dan isu strategis lainnya yang berkaitan dengan pengendalian inflasi</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>a. Melakukan Pendataan Harga Pangan Melakukan Input data Harga Pangan ke aplikasi SILINDA JABAR</p>	<p>Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</p>
			<p>b. Penyajian Data Harga Pangan di SILINDA</p>	<p>b. Penyajian Data Harga Pangan di SILINDA</p>	<p>b. Penyajian Data Harga Pangan di SILINDA</p>	<p>b. Penyajian Data Harga Pangan di SILINDA</p>	<p>b. Penyajian Data Harga Pangan di SILINDA</p>	<p>b. Penyajian Data Harga Pangan di SILINDA</p>	<p>b. Penyajian Data Harga Pangan di SILINDA</p>	<p>Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</p>
			<p>Koordinasi dan Komunikasi dengan anggota TPID, instansi/lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah Mengenai Kondisi Pangan</p>	<p>Koordinasi dan Komunikasi dengan anggota TPID, instansi/lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah Mengenai Kondisi Pangan</p>	<p>Koordinasi dan Komunikasi dengan anggota TPID, instansi/lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah Mengenai Kondisi Pangan</p>	<p>Koordinasi dan Komunikasi dengan anggota TPID, instansi/lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah Mengenai Kondisi Pangan</p>	<p>Koordinasi dan Komunikasi dengan anggota TPID, instansi/lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah Mengenai Kondisi Pangan</p>	<p>Koordinasi dan Komunikasi dengan anggota TPID, instansi/lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah Mengenai Kondisi Pangan</p>	<p>Koordinasi dan Komunikasi dengan anggota TPID, instansi/lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah Mengenai Kondisi Pangan</p>	<p>Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</p>
			<p>Melakukan sidak ke Pasar Tradisional Modern menjelang HBKN</p>	<p>Melakukan sidak ke Pasar Tradisional Modern menjelang HBKN</p>	<p>Melakukan sidak ke Pasar Tradisional Modern menjelang HBKN</p>	<p>Melakukan sidak ke Pasar Tradisional Modern menjelang HBKN</p>	<p>Melakukan sidak ke Pasar Tradisional Modern menjelang HBKN</p>	<p>Melakukan sidak ke Pasar Tradisional Modern menjelang HBKN</p>	<p>Melakukan sidak ke Pasar Tradisional Modern menjelang HBKN</p>	<p>Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Bagian Perekonomian</p>

PARAF KOORDINASI
 KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

 KEPALA BAGIAN HUKUM

		Penguatan Pelaporan Kegiatan Pengendalian Inflasi kepada Provinsi dan Pusat	<p>a. Penyusunan laporan kegiatan pengendalian inflasi secara triwulan (4 laporan)</p> <p>b. Penyusunan peta jalan/Road map TPID</p>	<p>a. Penyusunan laporan kegiatan pengendalian inflasi secara triwulan (4 laporan)</p> <p>b. Penyusunan peta jalan/Road map TPID</p>	<p>a. Penyusunan laporan kegiatan pengendalian inflasi secara triwulan (4 laporan)</p> <p>b. Penyusunan peta jalan/Road map TPID</p>	<p>Bappelitbangda, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Bagian Perencanaan</p>
2. Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah	Menjalin komunikasi harmonisasi dengan instansi / lembaga terkait	<p>Koordinasi dan komunikasi dengan instansi/ lembaga terkait mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat atau isu strategi lainnya</p>	<p>Koordinasi dan komunikasi dengan instansi/ lembaga terkait mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat atau isu strategi lainnya</p>	<p>Koordinasi dan komunikasi dengan instansi/ lembaga terkait mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat atau isu strategi lainnya</p>	<p>Koordinasi dan komunikasi dengan instansi/ lembaga terkait mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat atau isu strategi lainnya</p>	<p>Bagian Perencanaan, KPW Bank Indonesia Jabar</p>
	Rapat Koordinasi	<p>a. Rapat Koordinasi TPID</p> <p>b. Capacity Building</p> <p>c. Forum Group Discussion</p> <p>d. High Level Meeting</p>	<p>a. Rapat Koordinasi TPID</p> <p>b. Capacity Building</p> <p>c. Forum Group Discussion</p> <p>d. High Level Meeting</p>	<p>a. Rapat Koordinasi TPID</p> <p>b. Capacity Building</p> <p>c. Forum Group Discussion</p> <p>d. High Level Meeting</p>	<p>a. Rapat Koordinasi TPID</p> <p>b. Capacity Building</p> <p>c. Forum Group Discussion</p> <p>d. High Level Meeting</p>	<p>Bagian Perencanaan</p>
					<p>a. Rapat Koordinasi TPID</p> <p>b. Capacity Building</p> <p>c. Forum Group Discussion</p> <p>d. High Level Meeting</p>	<p>Kepala Daerah, Sekda, Anggota Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) Kota Bekasi</p>

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

3.	Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	Melakukan siaran pers, talk show, Bekasi Menjawab dan program lainnya dalam rangka membentuk persepsi positif masyarakat	a. Pemanfaatan media elektronik b. Forum Ulama	a. Pemanfaatan media elektronik b. Forum Ulama	a. Pemanfaatan media elektronik b. Forum Ulama	a. Pemanfaatan media elektronik b. Forum Ulama	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Forkopimda, Bagian Kesos
----	----------------------------------	--	---	---	---	---	---

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


 TRI ADHIANTO TJAHYONO